

KONFLIK ATAS PEMBEBASAN TANAH DI KALANGAN MASYARAKAT DESA ADAT SELASIH (Suatu Kajian Ketahanan Nasional)

Conflicts on Land Removals in the Selasih Custom Village Society (A National Resilience Research)

Wayan Landrawan¹, Hari Poerwanto², dan Suyitno³

*Program Studi Ketahanan Nasional
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This study aims to uncover conflicts that occurred in the Selasih custom village society on land removals for golf court development plan. It focuses on problems, such as the existing conflict forms, the contributed factors, the conflict solution mode, and the implication on sociocultural life and the sociocultural resilience of the Selasih custom village society.

Units of analysis were the household chiefs, i.e. 60 household chiefs that represented 90 household chiefs whose lands were removed for the golf court development plan. The respondent selection based on the sampling technique "Proportional Stratified Random Sampling". The primary data were gathered through structured interviews by using questionnaire instruments. In addition, they were also performed through depth interview technique by using interview guide on ten sources considered to have the knowledge of the problems related to the study. Meanwhile, the information was also gathered from secondary data, among others: from the village monographs, the Payangan Subdistrict Office, and the existing documents in the *Badan Pertanahan Nasional* (National Land Body), Gianyar. The data analyses were carried out quantitatively and qualitatively. The quantitative data result was analyzed by frequency distribution, while the qualitative data result was analyzed by meaning and based on the existing concepts and theories.

The study results show that the existing conflicts were not until at struggle forms accompanied by physical fights. Basically, the struggles stemmed from the existing interest and land value differences in the Selasih custom village society. A part of villagers considered that the land was not only as production factors economically, but also related to the *waris* and the transcendental matters, so that the existence must be maintained. Another part considered the land only as assets on capitals that the existence was changeable in another form. There were various factors contributed to the

1. STKIP Singaraja Bali.

2. Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

3. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

emergence and development of the conflicts, e.g. factors that come from the Selasih custom village itself (internal factors) and factors that come from the levels of the relative low education, the low society mobility, the changes of the existing values in a part of the society. The external factors, i.e. the regional government policy, the political and economic interests of some regional leaders, factors of the land owners that come from outside of the Selasih custom village, and the conflict occurrences that happened in Bali.

Basically, the custom villages have big roles in controlling, restricting and overcoming the existing conflicts. The efforts were performed persuasively by *bendesa adat* and *prajuru adat*. The, "special" meeting (*sangkepan*) and the "special" meeting that involved the official village chief, the Payangan sector police and the subdistrict leader as representing the regional government part, accompanied them. In addition, the regional government of Gianyar District, i.e. through a policy also performed the conflict settlement efforts by canceling the golf court development plan. The existing conflicts were relatively not to change the order and basic social relation structure of the Selasih custom village. The study findings also show that there was a relation structure of the Selasih custom village. The study finding also shows that custom village sociocultural resilience was relatively good.

Key words: *conflict – land removal – custom village society – sociocultural life.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan Bali bukanlah suatu perkecualian dalam hal ini. Menurut Pitana (1994 : 4) berbagai faktor, seperti pendidikan, media massa, komunikasi, transportasi yang merambah Bali, dan proses pembangunan kepariwisataan secara simultan telah menjadi motor penggerak perubahan sosial, ekonomi, budaya di Bali. Laju perkembangan pariwisata nampaknya telah memicu semakin cepatnya pergeseran dan transformasi nilai-nilai masyarakat, terutama pada masyarakat yang menjadi tujuan wisata atau kawasan pengembangan pariwisata. Pada beberapa *desa adat* di Bali terjadi perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat dalam hubungan dengan tanahnya, termasuk juga dengan keberadaan tanah adat. Hal ini bersamaan dengan semakin tingginya nilai ekonomis tanah, karena perluasan areal kawasan wisata maupun fasilitas pariwisata, serta pembangunan fisik lainnya. Banyak tanah adat telah berubah fungsi dari fungsi sosial religius ke fungsi ekonomis dan bisnis, terutama di *desa-desi adat* daerah wisata, seperti Ubud, Sanur, Kuta dan daerah wisata lainnya.

Berbagai konflik dalam masyarakat *desa adat* terkait dengan tanah dengan berbagai variasi dan bentuknya menjadi fenomena dalam satu dekade terakhir ini. Suartini et al., (1998) mencatat, bahwa semenjak tahun 1993 hingga kini (tahun 1998) telah terjadi tidak kurang dari tujuh kasus adat yang berkaitan dengan tanah. Konflik-konflik masyarakat *desa adat* ini dapat berimplikasi terhadap kehidupan sosial budaya, sebab tanah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan masyarakat dan budayanya. Alih fungsi atau transportasi atas tanah akan berkaitan secara signifikan terhadap individu maupun komunitas yang pada mulanya menguasai tanah tersebut. Akan terjadi perubahan pola hubungan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial maupun budaya. Karenanya, juga akan berimplikasi terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat.

Desa adat Selasih termasuk dalam wilayah desa dinas administratif Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar-Bali. Terletak sekitar 35 km ke arah timur laut kota Denpasar. Desa ini termasuk dalam kawasan pengembangan pariwisata Ubud. Seiring dengan perkembangan pariwisata di daerah ini, pada tahun 1994 dilakukan pembebasan tanah untuk rencana pembangunan lapangan golf dan fasilitas penunjangnya. Pembebasan itu direncanakan meliputi tanah seluas 200 hektar, atau 55,56% dari luas tanah di *desa adat* Selasih. Upaya pembebasan tanah ini, disamping menyangkut tanah hak milik perseorangan (tanah *guna kaya*), juga berhubungan dengan tanah *desa adat*. Hal tersebut menimbulkan keresahan dan aksi penolakan oleh sebagian masyarakat desa adat. Selanjutnya menimbulkan konflik di kalangan *krama* (warga) *desa adat*.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena konflik ini merupakan konflik yang intern, telah meluas dan melibatkan banyak pihak. Di samping itu, konflik ini sudah berlangsung relatif lama, sehingga fenomena sosial-budaya sebagai implikasi konflik dapat teramati melalui penelitian, dan sampai saat ini, belum ada penelitian yang mengkaji pembebasan tanah itu serta implikasinya terhadap kehidupan sosial-budaya melalui pendekatan konflik dan Ketahanan Nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : *bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terjadi di kalangan masyarakat desa adat Selasih, faktor-faktor apa yang memberikan kontribusi, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sosial-budaya dan ketahanan masyarakat desa adat Selasih, terutama dilihat dari aspek ketahanan sosial-budayanya?*

Tinjauan Teoritis

Suku bangsa Bali digambarkan oleh Gerya (1993 : 92) sebagai kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali sebagai unsur pemberi identitas orang Bali. Menurut Mantra (1993 : 13) struktur dalam atau intinya merupakan perpaduan antara tradisi dan agama Hindu, yang tercermin dalam konsepsi-konsepsi: *rwa bineda* (dualistik), *tri hita karana* (keselarasan), *desa kala patra* (fleksibilitas sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan) dan *karma phala* (hukum perbuatan). Sementara itu menurut Clifford Gertz (1959) ada tujuh segi kehidupan sosial hingga saat ini masyarakat Bali masih tetap mempertahankan lembaga *desa adat* di samping desa sebagaimana diatur oleh UU No. 5 tahun 1979. Pada dasarnya desa adat merupakan suatu komunitas yang disatukan oleh ikatan budaya dan keagamaan, yaitu agama Hindu. Sebagai satu kesatuan keagamaan, *desa adat* ditentukan oleh komplek *pura* yang disebut *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*, yaitu *pura puseh*, *pura desa*, dan *pura dalem*. *Krama* (warga) desa adat merupakan *penyungsong* (jemaat) yang bertanggung jawab atas segala biaya pembangunan, pemeliharaan, dan upacara keagamaan (ritual). Dalam kerangka ini pada umumnya *desa adat* memiliki tanah adat. Tanah ini merupakan semacam tanah *ulayat*. Kesatuan tempat atau tanah warga bertempat tinggal di samping merupakan tanah adat juga terdapat tanah hak milik perseorangan (tanah *guna kaya*).

Konflik di kalangan masyarakat *desa adat* Selasih berkaitan dengan pembebasan tanah dikaji dengan mempergunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan Lewis A. Coser. Menurut Dahrendorf (Poerwanto, 1997 : 42). Secara relatif, setiap komunitas adalah (1) terdiri dari konfigurasi unsur-unsur; (2) setiap unsur terintegrasi dengan baik dalam konfigurasi itu; (3) setiap unsur dapat memberikan kontribusi fungsional; (4) setiap warga masyarakat tunduk pada konsensus yang telah disepakati. Setiap masyarakat juga memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan model tersebut, yaitu (1) setiap komunitas merupakan subyek dari perubahan; (2) setiap komunitas pernah mengalami konflik; (3) setiap unsur yang ada dalam komunitas memiliki kontribusi yang sama untuk berubah; dan (4) setiap anggota masyarakat menyadari bahwa diantara mereka saling memiliki perbedaan.

Konsep sentral teori konflik yang ditawarkan Dahrendorf adalah wewenang dan posisi, dengan membangun sebuah model konflik dikaitkan dengan kekuasaan. Dengan kata lain, berbagai konflik dapat dijelaskan dengan menunjuk pada kedudukan struktur sosial tertentu. Dahrendorf (Poerwanto, 1997 : 42) mempergunakan berbagai tahapan

dichotomy yang memakai pengandaian berupa *imperatively coordinated group*. Dalam konsep ini terkandung pengertian, bahwa dimanapun manusia berada, kehidupannya diwadahi oleh suatu organisasi sosial. Karenanya, akan selalu dapat dijumpai seseorang dalam posisi tertentu, misalnya mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Bentuk-bentuk kehidupan dalam masyarakat yang mendasarkan "atas" dan "bawah"; "kami" dan "mereka", mencerminkan adanya pembagian dalam masyarakat yang bersifat universal.

Model konflik Dahrendorf dikembangkan lagi, yaitu dengan mengaitkan dengan teori konflik Lewis A. Coser. Menurut Coser (Poerwanto, 1997: 43-44), pada dasarnya konflik tidak selamanya mempunyai implikasi negatif. Konflik yang terjadi mengandung beberapa fungsi, apakah konflik yang terjadi dapat berfungsi, dan mengakibatkan perubahan sosial ke arah terbentuknya suatu sistem sosial yang baru; sangat tergantung pada derajat kekakuan dan tingkat resistensi sistem sosial itu sendiri. Suatu sistem sosial yang kaku, cenderung menghambat munculnya konflik, namun apabila komunitas ini mengalami konflik, maka akibat yang ditimbulkan adalah cukup keras. Sebaliknya dalam komunitas dengan sistem sosial yang lebih elastik, suatu konflik diberi kesempatan diekspresikan.

Konflik dalam hubungannya dengan ketahanan masyarakat *desa adat*, khususnya ketahanan sosial-budaya dapat dianalisis melalui konsep Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional (Sunardi, 1997 : 2).

Sebagai kondisi dinamik, ketahanan nasional sesungguhnya merupakan gambaran dari tata kehidupan nasional pada saat tertentu, yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pada akhirnya dapat dilihat ketahanan masing-masing aspek itu dalam suatu waktu. Sunardi (1997) mengatakan, bahwa dalam kehidupan keseluruhan gatra merupakan satu kesatuan bulat atau *gestalt*, namun gatra-gatra tersebut dapat dibedakan secara teoritik analitik dalam rangka pemetaan dari keadaan nyata dengan cara *many - to - one*. Ketahanan sosial budaya masyarakat *desa adat* Selasih dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat Selasih dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan kehidupan sosial-budayanya. Indikator ketahanan

sosial budaya masyarakat desa adat Selasih mengacu pada konsepsi Gertz (1959) tentang tujuh segi kehidupan sosial budaya yang mengikat orang Bali, gambaran Gerya (1997) dan Mantra (1993) tentang suku bangsa Bali, serta konsep Ketahanan Nasional.

CARA PENELITIAN

Populasi penelitian adalah seluruh pemilik dan pengelola atas tanah-tanah yang dibebaskan berjumlah 90 kepala keluarga, dan 60 kepala keluarga dijadikan responden yang diambil berdasarkan tehnik pengambilan sampel: *Proportional Stratified Random Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara. Hasilnya dianalisis secara kuantitatif (dengan distribusi frekuensi) dan secara kualitatif, yaitu melalui pemaknaan dan didasarkan atas konsep-konsep dan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Konflik

Konflik yang terjadi di kalangan masyarakat desa adat Selasih belum sampai pada pertentangan yang disertai dengan bentrokan fisik (perkelahian atau pengerusakan), namun sudah berada pada bentuk pertentangan dalam kadar yang relatif tinggi, yaitu berwujud demonstrasi. Albert F. Eldrige mengklasifikasikan bentuk konflik ini dalam konflik dengan kekerasan (*violence*) (Haryanto, 1990 : 69).

Sebagian besar responden, yaitu 85% menyatakan tidak pernah terjadi pertentangan yang disertai dengan bentrokan fisik di antara warga *desa adat* yang menentang dengan yang mendukung rencana pembangunan lapangan golf. Tidak terjadinya bentrokan fisik antara pihak-pihak yang bertentangan, karena masih kuatnya keyakinan *krama desa adat* terhadap hukum *karma phala*. Di samping juga masih kuatnya konsepsi dualistik (*rwa bhineda*) dalam alam pikiran masyarakat. Hasil penelitian terhadap 60 responden menggambarkan, bahwa sebagian besar responden atau 88,33% menyatakan masih percaya adanya hukum *karma phala*, sementara itu tidak ada responden yang menyatakan tidak percaya.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap muncul dan berkembangnya konflik di kalangan masyarakat desa adat Selasih, yaitu yang bersumber dari masyarakat Selasih sendiri (faktor *internal*) dan yang berasal dari luar desa adat Selasih (faktor *eksternal*). Kedua faktor ini pada dasarnya saling mengisi dan memunculkan pertentangan diantara

individu-individu, maupun antar kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor *internal*, adalah relatif masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perubahan nilai-nilai sosial budaya pada masyarakat desa adat, dan rendahnya mobilitas masyarakat.

Sebagian besar penduduk Selasih, yaitu 63,63% berpendidikan sekolah dasar. Sementara itu, penduduk yang berpendidikan Perguruan Tinggi, hanya 1,7%. Hal ini berimplikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan. Perubahan nilai-nilai pada sebagian masyarakat desa adat melahirkan perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan di kalangan masyarakat. Terdapat 48,33% responden memandang tanah hanya sebagai aset atau modal yang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak mesti harus dipertahankan. Sementara itu, 35,0% masih tetap memandang bahwa, tanah tidak saja bermakna ekonomis, tetapi berkaitan dengan waris, yaitu sebagai warisan leluhur yang mesti dipertahankan, karena diyakini berhubungan dengan hal-hal *transendental*. Mobilitas penduduk baik vertikal, yaitu menyangkut perubahan status (pendidikan, pekerjaan), dan mobilitas horisontal, yaitu gerak (*movement*) penduduk melintasi wilayah lain dalam periode tertentu relatif masih rendah. Hal ini tampak dari keadaan pendidikan dan mata pencaharian penduduk, bahwa 85,50% pekerjaan penduduk adalah sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan *benadesa adat*, kepala dusun dan beberapa warga diketahui, bahwa sangat sedikit warga yang bekerja atau berusaha di luar desa adat, baik sebagai buruh, pedagang atau pekerjaan lain. Gerak penduduk menuju kota, terutama kota kabupaten atau propinsi relatif jarang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang relatif masih kurang dan sulit.¹

Faktor yang berasal dari luar desa adat (faktor *eksternal*), adalah a) kebijakan pemerintah daerah; b) kepentingan yang bersifat politik dan ekonomi pejabat pemerintah di daerah Kabupaten Gianyar; c) Kepentingan yang bersifat ekonomis pemilik tanah yang berasal dari luar desa adat Selasih; dan d) peristiwa konflik yang terjadi di Bali.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 528 tahun 1993, tentang kawasan pariwisata, ditetapkan bahwa Desa Puhu, Kecamatan Payangan-Gianyar termasuk dalam kawasan pengembangan pariwisata Ubud. Implikasinya, bahwa potensi yang ada dalam masyarakat di wilayah ini dikembangkan ke arah pembangunan fasilitas pariwisata. Terbitnya ijin lokasi PT Ubud Resort Duta Development untuk membangun lapangan golf yang memicu konflik terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sementara itu, banyak pejabat pemerintah di daerah kabupaten Gianyar yang mempergunakan kesempatan pembebasan tanah tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomis,

di samping juga berusaha mengamankan jabatannya dengan cara mendukung dan berusaha agar kebijakan pemerintah daerah dapat terealisasi. Hal ini tercermin dari keterlibatan mereka dalam proses pembebasan tanah; dalam bentuk melakukan pendekatan serta cara lain dengan *prajuru adat*, tokoh-tokoh masyarakat, atau pemegang hak atas tanah. Selain itu, para penghubung (*calo*) umumnya mengatas namakan para pejabat dalam usahanya untuk membebaskan tanah.²

Sementara itu, tanah yang berhasil dibebaskan adalah 94,45 hektar, dari luas ini 66% atau 62,257 hektar merupakan milik orang yang berasal dari luar desa adat Selasih. Hanya 32,158 hektar atau 34% merupakan milik *krama* desa adat. Kecenderungan para pemilik yang berasal dari luar desa adat untuk menjual tanahnya didasarkan atas pertimbangan ekonomis. Tanah yang pada mulanya berharga Rp. 6.000,00 - Rp. 9.000,00 per m², setelah keluarnya ijin lokasi dan pembebasan tanah menjadi berharga Rp. 20.000,00 - Rp. 25.000,00 per m². Penjualan atas tanah-tanah yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari luar desa adat berimplikasi terhadap sikap pemilik tanah di desa adat Selasih, dan para penggarap serta *krama desa adat* atas tanah adat yang berada dalam *site plan* proyek pembangunan lapangan golf.³

Berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Bali, yang cenderung mengambil langkah-langkah konfrontatif, termasuk dalam wujud unjuk rasa/demonstrasi banyak terjadi bersamaan dengan konflik pada masyarakat desa adat Selasih. Peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi masyarakat desa adat Selasih dalam merespon permasalahan yang muncul.

Cara Penyelesaian Konflik

Pada awal terjadinya konflik, tampak peranan *bendesa adat* bersama *prajuru adat* lainnya berupaya mengendalikan dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara kekeluargaan, yaitu melalui pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang saling bertentangan. Setelah intensitas konflik di antara warga semakin tinggi, upaya pengendalian dan penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme kelembagaan desa adat, yaitu *sangkepan* (rapat) "khusus" desa adat. Termasuk juga *sangkepan* (rapat) "khusus" desa adat yang melibatkan kepada desa administratif, kepolisian sektor Payangan, dan Camat, sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah TK. II Gianyar cq. Bupati Gianyar mengeluarkan kebijakan berupa pembatalan rencana pembangunan lapangan golf.

Sementara ini, upaya-upaya di atas pada dasarnya telah dapat

menghentikan induk konflik yang terjadi. Hingga saat ini belum muncul kembali pertentangan-pertentangan di kalangan masyarakat, termasuk juga respon-respon negatif dari pihak-pihak yang bertikai, seperti unjuk rasa, atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan negatif yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan atau melalui media massa.

Implikasi Konflik terhadap Kehidupan Sosial Budaya

Struktur hubungan masyarakat desa adat Selasih dan kehidupan sosial budayanya tidak dapat dilepaskan dari kerangka *tri hita karana*, yang terdiri dari unsur *parhyangan* (tempat pemujaan/*pura*), *Pawongan* (warga/*krama*) desa adat, dan *palemahan* (lingkungan).

Parhyangan (tempat pemujaan), mengacu pada *pura*, yaitu *pura* (*sanggha/merajan*), *pura* klen kecil/*dadia*, dan *pura kahyangan tiga*. Kehidupan masyarakat desa adat dalam hubungannya *pura-pura* tersebut pada dasarnya masih menunjukkan intensitas yang relatif tinggi. Hal ini tampak dari terlaksananya upacara-upacara (ritual) yang bersifat rutin setiap enam bulan sekali. Di samping itu, tercermin dari keterlibatan *krama* dalam bentuk *ngayah* (menyediakan diri untuk ikut kerja) di *pura* dan keterlibatan *krama* dalam persembahyangan bersama.

Tabel 1. Keterlibatan Responden dalam *Ngayah* dan ikut dalam persembahyangan bersama di *Pura Dadia*, dan di *Pura Kahyangan Tiga* dalam dua tahun terakhir.

Keterlibatan Responden	<i>Pura dadia</i>				<i>Pura kahyangan tiga</i>			
	<i>Ngayah</i>		Sembahyang bersama		<i>Ngayah</i>		Sembahyang bersama	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Selalu ikut	49	81,67	51	85	57	95	48	80
Kadang-kadang	8	13,33	9	15	3	5	9	15
Tidak pernah	3	5,0	0	0	0	0	3	5
	60	100,00	60	100,00	60	100,00	60	100,00

Dalam dua tahun terakhir, 81,67% responden menyatakan selalu ikut *ngayah* di *pura dadia*, dan sebagian besar yaitu 95% juga menyatakan selalu ikut *ngayah* dalam setiap kegiatan di *pura kahyangan tiga*. Demikian juga dalam kaitannya dengan persembahyangan bersama, sebagian besar responden, yaitu 85% selalu ikut dalam persembahyangan bersama di *pura dadia* maupun *kahyangan tiga*. Data ini mengindikasikan masih kuatnya ketaatan beragama, dan masih relatif tingginya intensitas aktivitas sosial atau kehidupan masyarakat desa adat berkaitan dengan unsur *parhyangan*. Menurut *bendesa adat* Selasih dan Pendeta *kahyangan tiga*, dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *pura* terlihat adanya

kekompakan di antara *krama* desa adat, mereka dapat melupakan pertentangan yang pernah terjadi.

Unsur *pawongan* mengacu pada unsur manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, yang lazim disebut *pekraman*. Hubungan antara *krama* (warga), terutama pada tingkat klen kecil/*dadia* menunjukkan hubungan yang dekat dan akrab. Hal ini tercermin dengan tetap bertahannya tradisi *ngoopin* pada saat penyelenggaraan ritus di tingkat keluarga.⁴ Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar atau 88,33% warga menyatakan masih melaksanakan tradisi tersebut diantara warga satu klen kecil/*dadia*, 11,67% responden menyatakan kadang-kadang melaksanakan dan tidak ada satu responden pun yang mengatakan tidak melaksanakan tradisi *ngoopin* pada warga satu *dadia*.

Tradisi *ngoopin* yang masih kuat diantara warga satu klen kecil/*dadia*, ternyata sudah semakin kurang dilaksanakan diantara warga di luar klen kecilnya/*dadia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% responden menyatakan sudah tidak pernah *ngoopin* pada warga di luar klen kecilnya, 8,33% menyatakan kadang-kadang melaksanakan, dan 26,67% masih melaksanakan tradisi tersebut pada warga di luar klen kecil/*dadia*. Data ini mengindikasikan, bahwa rasa kebersamaan atau solidaritas di kalangan *krama* (warga) di luar klen kecil sudah semakin berkurang, terutama yang berhubungan dengan aktivitas perseorangan.

Sementara itu, hubungan antara individu di luar kerabatnya (klen kecil/*dadia*) menunjukkan hubungan yang relatif kurang akrab. Hal ini diakui oleh 63,34% responden. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya jarak sosial, diantara *krama* desa adat. Namun demikian, hubungan ini dapat diakomodasi oleh kepentingan dalam kerangka desa adat/*banjar*, terutama kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan dan adat istiadat. Beberapa *seka* juga masih ada dan berfungsi dalam masyarakat Selasih, dan hampir semuanya merupakan *seka* yang berfungsi menunjang kegiatan-kegiatan desa adat, terutama ritual pada *pura kahyangan tiga*.⁵

Unsur *Palemahan* mengacu pada lingkungan atau wilayah dimana manusia (warga) berada. Unsur lingkungan atau wilayah dalam konstelasi kehidupan sosial budaya masyarakat Bali dipandang bersifat *sekala* (nyata/kasat mata) dan *niskala* (maya). Hal ini berkaitan dengan konsepsi *rwa bineda* (dualistik) yang masih kuat dalam alam pikiran masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup, sesuai konsepsi *tri hita karana* manusia harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara lingkungan yang bersifat *sekala* dan *niskala*.

Kepercayaan di atas diungkapkan oleh masyarakat melalui berbagai

ritual, baik pada lingkungan keluarga, maupun pada tingkat lingkungan desa adat, seperti *tawur kesanga*, *tumpek uduh* dan, *segehan kajeng kliwon*. Ritual-ritual ini dilaksanakan secara rutin. *Tawur kesanga* dilaksanakan sekali dalam setahun, yaitu sehari menjelang hari raya *Nyepi*, baik di tingkat desa adat maupun di tingkat keluarga. *Tumpek uduh* dilaksanakan sekali dalam 210 hari atau enam bulan, yaitu setiap sabtu *kliwon wuku wariga*, di tingkat desa adat maupun keluarga. Sementara itu, *segehan kajeng kliwon* dilakukan di tingkat keluarga setiap sebulan sekali, yaitu pada hari *kajeng kliwon*. Pada dasarnya semua ritual tersebut maknanya sama yaitu sebagai persembahan dan permohonan kepada *Dewa Siwa* (manifestasi Tuhan sebagai penghancur) yang dikonsepsikan sebagai penguasa atas *buta* dan *kala* (roh jahat) dan berbagai makhluk halus lainnya, agar unsur-unsur jahat tersebut dinetralisir sehingga tidak mengganggu keharmonisan.

Implikasi Konflik Terhadap Ketahanan Sosial Budaya

Dengan mempergunakan kerangka konsepsi *tri hita karana* telah dapat diketahui, bahwa konflik atas pembebasan tanah relatif kecil pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya desa adat Selasih. Di samping itu, untuk memperoleh gambaran mengenai ketahanan sosial budaya, mengacu pada konsepsi Gertz (1959) tentang keterikatan orang Bali terhadap tujuh segi kehidupan sosial budayanya.

Tabel 2. Rekapitulasi Keterikatan Responden Terhadap Tujuh Segi Kehidupan Sosial Budaya.

Pendapat Responden	Tempat pemujaan	Desa adat	Organisasi Subak	Seka	Kekerabatan	Kasta	DS Administratif	Rata-rata
	%	%	%	%	%	%	%	%
Sangat terikat	86,66	88,33	86,67	75	81,67	63,33	81,67	80,48
Kadang-kadang	12,23	11,67	0	6,67	18,33	8,34	18,33	10,80
Tidak terikat	1,11	0	13,33	18,33	0	28,33	0	8,72
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sebagian besar responden, yaitu 80,48% menyatakan masih terikat terhadap tujuh segi kehidupan sosial budaya. Hal ini mengindikasikan keterikatan masyarakat terhadap segi-segi kehidupan sosial budayanya masih kuat. Dengan demikian. Berdasarkan dua kerangka acuan di atas dapat diketahui bahwa ketahanan sosial budaya masyarakat desa adat Selasih relatif masih cukup baik. Hal ini juga bermakna, bahwa konflik realtif tidak berimplikasi terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat desa adat Selasih.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di kalangan masyarakat desa adat Selasih belum sampai pada bentuk pertentangan yang disertai dengan kekerasan fisik. Pada dasarnya, pertentangan-pertentangan yang terjadi bersumber dari perbedaan kepentingan ekonomi dan perbedaan nilai atas tanah di kalangan masyarakat desa adat Selasih. Perbedaan kepentingan ekonomi, terutama terjadi antara pemilik dengan penggarap, antara anggota suatu keluarga terkait dengan tanah waris, dan diantara kelompok masyarakat. Dengan adanya pembebasan tanah dan rencana pembangunan lapangan golf, ada sebagian warga yang mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Sebaliknya, ada yang merasa dirugikan secara ekonomis maupun secara sosial. Pertentangan akibat perbedaan kepentingan ini terkait dengan pemahaman sebagian besar warga terhadap status kepemilikan yang sah atas tanah. Di samping juga masih adanya status yang kurang jelas atas tanah-tanah tertentu. Perbedaan nilai-nilai atas tanah berkaitan dengan tanah hak milik (*guna kaya*) maupun tanah adat. Sebagian warga cenderung memandang tanah hanya sebagai aset atau modal dalam arti ekonomis. Sebaliknya, sebagian warga lainnya memandang tanah tidak hanya sebagai aset atau modal secara ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan waris dan hal-hal yang bersifat *transendental*.

Pada dasarnya upaya PT Ubud Resort Duta Development membebaskan tanah untuk rencana pembangunan lapangan golf merupakan pemicu muncul dan berkembangnya konflik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap konflik yang terjadi. Faktor-faktor ini berasal dari masyarakat desa adat Selasih sendiri (faktor *internal*) maupun faktor yang berasal dari luar desa adat Selasih (faktor *eksternal*). Sementara itu, pengendalian dan penyelesaian konflik tidak dapat dilepaskan dari peranan desa adat. Pemerintah daerah baru turun tangan dan mengambil kebijakan setelah konflik berada dalam kadar yang relatif tinggi.

Konflik di kalangan masyarakat desa adat menyebabkan terjadinya jarak sosial, terutama dalam hubungan sosial di tingkat desa adat, serta melemahnya tradisi *ngoopin* (saling menolong) di antara warga di luar klen kecil/*dadia*. Temuan penelitian juga menunjukkan, bahwa ketahanan sosial budaya desa adat relatif masih cukup baik. Indikatornya adalah relatif masih kuatnya identitas budaya masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai budaya Bali, dan masih kuatnya keterikatan masyarakat terhadap tujuh segi kehidupan sosial budayanya. Pada dasarnya nilai-nilai yang tercermin dalam konsepsi-konsepsi *rwa bhineda*, *desa kala patra*,

tri hita karana, dan *karma phala* merupakan diterminan ketahanan sosial budaya desa adat Selasih.

CATATAN KAKI

1. Hasil wawancara pada tanggal 19 dan 20 Januari 2000.
2. Hasil wawancara dengan beberapa *krama* desa adat 27 Desember 1999.
3. Data sekunder pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar, dan hasil wawancara dengan Bapak H. Hasyim, BA (Kabag H2T / BPN Gianyar tanggal 25 Nopember 1999, dan beberapa warga desa tanggal 19 dan 20 Januari 2000.
4. *Ngoopin* adalah bantuan secara ikhlas yang diberikan kepada seseorang yang memiliki satu pekerjaan tertentu, seperti menanam padi, menyelenggarakan upacara keagamaan di tingkat keluarga, dan sebagainya.
5. Pitana, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994, hal. 113. *Seka* merupakan kesatuan dari beberapa anggota *banjar*/ desa adat yang menghimpun diri atas dasar kepentingan yang sama dalam beberapa hal. *Seka* mempunyai anggota, struktur pimpinan, hubungan berpola antar anggota, aturan, dan fungsi tertentu dalam kaitan dengan kelompok sosial dan kepentingan yang sama di lingkungan *banjar*/ desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I Gusti Ngurah, 1996, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan Khususnya Pengembangan Pariwisata di Bali; Dampaknya Terhadap Kehidupan Orang Bali* (Makalah) dalam Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora III, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- _____, 1994, "Agenda Masa Depan; Epilog Ulasan dan Pengambilan Langkah", Pitana (Ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Depdikbud, 1997, *Adat-Istiadat Daerah Bali*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Gertz Clifford, 1959, *Form And Variation In Balinese Village*, America Antrophologie vol. 61, Chicago: University of Chicago Press.
- Gerya, I Wayan, 1993, "Model Interaksi Kebudayaan dan Industri Pariwisata Pada Masyarakat Bali (Suatu Refleksi Dari Strategi Pembangunan yang Berbudaya Dalam Era Industrialisasi)" Sudarta Tjok Rai (Ed), *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*, Denpasar: PT Upada Sastra.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*

Tanah, Jakarta: Djambatan.

Lemhanas, 1989, *Ketahanan Nasional Edisi II*, Jakarta: Lemhanas.

Poerwanto, Hari, 1990, *Orang Khek di Singkawang, Suatu Kajian Mengenai Masalah Orang China Dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia*, Disertasi Bidang Antropologi, Jakarta: Universitas Indonesia.

_____, 1997, "Teori Konflik dan Dinamika Hubungan Antar Suku Bangsa," *Humaniora* Nomor. VI Oktober-Nopember 1997, Hal 40-47, Yogyakarta: *Buletin Fakultas Sastra UGM*.

Pitana, I Gede, 1994, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Penerbit Bali Post.

Suasthawa, D made, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Denpasar: CV Kayumas.

Suartini, Luh dkk., 1998, "Tanah Laba Pura; Suatu Perspektif Perubahan Nilai-Nilai Sosial, Budaya, dan Religius Sebagai Dampak Perkembangan Pariwisata (Studi Kasus pada Desa Adat Tebu Kauh-Bali)", Singaraja: *Laporan Penelitian STKIP*.

Sunardi, R.M, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta: HASTANAS.

Warren Carol, 1993, *Adat And Dinas; Balinese Communities In Indonesia State*, New York: Oxford University Press.